

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN
ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

❑ **DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Sumatera Utara	14.928.784.000
2	Provinsi Riau	21.745.029.000
3	Provinsi Kepulauan Riau	2.000.000.000
4	Provinsi Jawa Barat	15.540.748.000
5	Provinsi Jawa Tengah	16.371.911.000
6	Provinsi DI Yogyakarta	2.000.000.000
7	Provinsi Jawa Timur	22.582.580.000
8	Provinsi Kalimantan Timur	18.274.764.000
9	Provinsi Sulawesi Utara	23.336.184.000
10	Provinsi Sulawesi Selatan	2.000.000.000
11	Kab. Aceh Tengah	28.958.078.000
12	Kota Banda Aceh	26.951.312.000
13	Kab. Pasaman	19.379.400.000
14	Kab. Pelalawan	19.898.343.000
15	Kota Pekanbaru	22.204.341.000
16	Kab. Bengkulu Selatan	20.320.283.000
17	Kab. Kaur	24.591.138.000
18	Kab. Lampung Barat	23.235.746.000
19	Kota Bandar Lampung	2.000.000.000
20	Kota Metro	2.000.000.000
21	Kota Tangerang	27.581.634.000
22	Kab. Banjarnegara	22.164.060.000
23	Kab. Batang	20.763.032.000
24	Kab. Cilacap	22.868.751.000
25	Kab. Jepara	24.071.408.000

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
26	Kab. Karanganyar	20.357.295.000
27	Kab. Pekalongan	20.365.340.000
28	Kab. Pemalang	24.942.968.000
29	Kab. Purbalingga	21.945.283.000
30	Kab. Semarang	19.107.028.000
31	Kota Pekalongan	20.368.569.000
32	Kota Surakarta	27.198.524.000
33	Kab. Kulon Progo	19.604.824.000
34	Kota Yogyakarta	22.900.008.000
35	Kab. Jombang	18.905.951.000
36	Kab. Kediri	19.686.145.000
37	Kab. Lamongan	25.608.110.000
38	Kab. Nganjuk	23.128.959.000
39	Kab. Pacitan	33.313.140.000
40	Kab. Probolinggo	23.456.117.000
41	Kab. Tulungagung	26.186.603.000
42	Kota Madiun	21.554.061.000
43	Kota Malang	24.814.154.000
44	Kab. Kotawaringin Barat	22.047.487.000
45	Kab. Barito Kuala	19.968.066.000
46	Kab. Berau	25.092.386.000
47	Kota Tarakan	20.923.324.000
48	Kab. Minahasa	23.733.571.000
49	Kota Bitung	23.377.791.000
50	Kab. Gorontalo	28.654.274.000
51	Kab. Banggai	26.324.144.000
52	Kab. Banggai Kepulauan	23.443.632.000
53	Kab. Poso	22.402.652.000
54	Kota Palu	22.820.879.000
55	Kab. Bone	20.362.762.000 (dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
56	Kab. Luwu Utara	26.698.488.000
57	Kab. Pinrang	21.579.953.000
58	Kota Makassar	20.685.984.000
59	Kab. Buton	25.031.468.000
60	Kab. Kolaka	21.230.740.000
61	Kab. Badung	23.284.553.000
62	Kab. Gianyar	19.070.923.000
63	Kab. Tabanan	19.803.261.000
64	Kota Denpasar	26.747.391.000
65	Kab. Sumba Tengah	22.668.349.000
66	Kota Jayapura	22.637.317.000
	Total Provinsi	138.780.000.000
	Total Kab/ Kota	1.249.020.000.000
	Total Nasional	1.387.800.000.000

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM
DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota*) menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JENIS BELANJA	RUPIAH		TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
				JUMLAH (5)	% dari Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1						
dst...						
Total						

Keterangan :

Kolom 1 : diisi dengan nomor

Kolom 2 : diisi dengan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011.

Kolom 3 : diisi dengan kegiatan yang direncanakan.

Kolom 4 : diisi dengan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, biaya bantuan keuangan, atau, belanja hibah.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah dari masing-masing belanja.

Kolom 6 : diisi dengan target dan indikator capaian yang terkait dengan kegiatan, misal : persentase ruang kelas yang memenuhi standar, persentase Angka Partisipasi Kasar, dsb.

Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota)

(cap dan tanda tangan)
Nama

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W MARTOWARDOJO